



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 692–701

Dinamika dan Prospek Representasi Politik Generasi Z dalam Keterwakilan Kursi Legislatif

Mu Zahratul Aulia, Muhammad Syahmi, Gusti Lean Habibie, Rifki Ahmad
Jauzi, Aerlangga Anwar, Hamdan Fajri, Sutri Destemi Elsi

Universitas Jambi

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3990>

How to Cite this Article

APA : Zahratul Aulia, Muhammad Syahmi, Gusti Lean Habibie, Rifki Ahmad Jauzi, Aerlangga Anwar, Hamdan Fajri, & Sutri Destemi Elsi. (2025). Dinamika dan Prospek Representasi Politik Generasi Z dalam Keterwakilan Kursi Legislatif. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 692 – 701. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3990>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Dinamika dan Prospek Representasi Politik Generasi Z dalam Keterwakilan Kursi Legislatif

Zahratul Aulia^{1*}, Muhammad Syahmi², Gusti Lean Habibie³, Rifki Ahmad Jauzi⁴,
Aerlangga Anwar⁵, Hamdan Fajri⁶, Sutri Destemi Elsi⁷
Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

*Email Korespondensi: zahratulaulia18@gmail.com

Diterima: 05-12-2025

| Disetujui: 15-12-2025

| Diterbitkan: 17-12-2025

ABSTRACT

The political representation of Generation Z has become an increasingly salient topic as demographic shifts reposition young citizens as a significant electoral force. However, their presence within parliamentary institutions remains limited, particularly in political systems where upper-house structures and constrained legislative seat allocations reinforce institutional preferences for seniority and continuity. This article analyzes the structural, procedural, and ideological factors that impede the entry of Generation Z into parliamentary settings, arguing that the configuration of upper-house bodies tends to privilege political actors with longer trajectories, established networks, and greater institutional capital. These dynamics intersect with party-centered recruitment practices, electoral thresholds, and internal hierarchies that collectively narrow pathways for younger candidates to obtain formal representation. Despite these constraints, the expanding influence of digital participation, youth-driven issue advocacy, and new forms of political mobilization demonstrates the growing capacity of Generation Z to shape legislative discourse from outside conventional parliamentary routes. The article contends that enhancing their parliamentary presence requires rethinking existing institutional norms and developing representational frameworks that align more closely with evolving democratic expectations and the changing political composition of contemporary societies.

Keywords: Generation Z, Political Representation, Upper House, Youth Participation, Institutional Barrier.

ABSTRAK

Representasi politik Generasi Z menjadi isu yang semakin penting seiring perubahan demografis yang menempatkan kelompok muda sebagai kekuatan elektoral yang signifikan. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga parlementer masih terbatas, terutama dalam sistem politik yang memiliki struktur majelis tinggi dan alokasi kursi legislatif yang sempit, yang pada umumnya memperkuat preferensi institusional terhadap senioritas dan stabilitas. Artikel ini menelaah faktor-faktor struktural, prosedural, dan ideologis yang menghambat masuknya Generasi Z ke dalam lingkungan parlemen, dengan menegaskan bahwa konfigurasi majelis tinggi cenderung menguntungkan aktor politik yang memiliki rekam jejak panjang, jaringan kuat, serta modal institusional yang mapan. Dinamika tersebut berkelindan dengan praktik rekrutmen berbasis partai, ambang batas pemilu, serta hierarki internal yang secara kolektif mempersempit jalur bagi kandidat muda untuk memperoleh keterwakilan formal. Meskipun menghadapi hambatan tersebut, meningkatnya pengaruh partisipasi digital, advokasi isu yang dipimpin generasi muda, serta bentuk-bentuk baru mobilisasi politik menunjukkan kapasitas Generasi Z untuk membentuk wacana legislatif dari luar jalur parlementer konvensional. Artikel ini berargumentasi bahwa peningkatan keterwakilan mereka di parlemen memerlukan peninjauan ulang terhadap norma-norma institusional yang berlaku serta pengembangan kerangka representasi yang lebih selaras dengan tuntutan demokrasi kontemporer dan perubahan komposisi politik masyarakat modern.

Kata kunci: Generasi Z, Representasi Politik, Majelis Tinggi, Partisipasi Pemuda, Hambatan Institusional.

PENDAHULUAN

Perkembangan politik kontemporer menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam komposisi demografis pemilih dan aktor politik. Salah satu kelompok yang mulai mendapatkan perhatian adalah Generasi Z, yaitu kelompok yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012 (Prensky, 2020). Generasi ini merupakan generasi pertama yang tumbuh dalam lingkungan teknologi digital yang mapan, sehingga pola komunikasi, konsumsi informasi, hingga partisipasi politik mereka sangat dipengaruhi oleh media baru dan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Twitter (Idris, 2023). Di berbagai negara, Generasi Z telah menunjukkan kecenderungan politik yang lebih progresif, kritis, dan berbasis isu (issue-based politics), berbeda dengan pola partisipasi tradisional yang cenderung berorientasi pada figur atau kedekatan dengan partai politik (Barisione & Michailidou, 2022).

Namun demikian, meskipun Generasi Z sangat aktif dalam ruang digital dan berbagai gerakan advokasi publik, representasi formal mereka dalam lembaga legislatif masih jauh tertinggal. Pada tingkat nasional maupun daerah, jumlah legislator yang berasal dari Generasi Z masih sangat minim dan tidak sebanding dengan proporsi mereka sebagai kelompok pemilih terbesar pada era politik pasca-pandemi (KPU, 2024). Rendahnya kehadiran mereka di parlemen menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana struktur politik formal membuka atau justru membatasi peluang bagi aktor-aktor muda untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah desain institusional parlemen, khususnya keberadaan parlemen tinggi (upper house) dan keterbatasan jumlah kursi legislatif yang tersedia. Dalam banyak sistem politik, majelis tinggi umumnya dirancang untuk menjaga stabilitas, kontinuitas kebijakan, dan menghadirkan tokoh politik yang dianggap berpengalaman. Karakteristik tersebut sering kali memunculkan preferensi institusional terhadap senioritas, jejaring politik yang mapan, serta modal politik yang kuat atribut yang umumnya belum dimiliki oleh politisi muda dari Generasi Z. Oleh karena itu, struktur parlemen tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang mempersempit akses Generasi Z untuk memperoleh posisi legislatif secara formal. Selain itu, keterbatasan kursi legislatif semakin memperketat kompetisi politik. Dalam sistem pemilu yang mengedepankan seleksi kandidat berbasis partai, internal party gatekeeping, dan persyaratan elektoral tertentu, kandidat muda sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketatnya persaingan dalam distribusi kursi juga menyebabkan partai politik lebih memilih calon yang memiliki modal politik, finansial, dan elektoral yang besar sebuah kondisi yang menempatkan Generasi Z dalam posisi kurang kompetitif dalam konteks perebutan kursi parlemen.

Pendekatan teori representasi yang dikembangkan oleh Hanna Pitkin (1967) dapat digunakan untuk membaca fenomena ini melalui empat perspektif: representasi formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Dalam konteks Generasi Z, aspek representasi deskriptif (jumlah legislator yang berasal dari Gen Z) masih sangat rendah, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya representasi substantif (kebijakan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka). Hal ini mengindikasikan adanya jarak antara tingkat partisipasi politik informal terutama melalui ruang digital dengan keterwakilan formal dalam lembaga legislatif.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritik penelitian ini berlandaskan teori representasi politik Hanna Pitkin yang mencakup empat dimensi utama: representasi formal, deskriptif, substantif, dan simbolik (Pitkin, 1967). Teori ini membantu menjelaskan jarak antara kemampuan Generasi Z mengartikulasikan aspirasi politik dengan peluang mereka untuk memperoleh posisi formal dalam lembaga legislatif (Norris, 2023). Selain itu, teori partisipasi digital digunakan untuk menjelaskan pola keterlibatan Generasi Z yang lebih aktif dalam ruang daring dibanding struktur politik konvensional (Vromen, 2021). Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya representasi pemuda dipengaruhi oleh struktur rekrutmen partai, bias usia, serta ketimpangan sumber daya politik (Muhtadi, 2020). Oleh karena itu, kajian teoritik ini menjadi landasan penting dalam memahami kesenjangan representasi antargenerasi dan dinamika politik kontemporer yang dipengaruhi perkembangan teknologi digital (Helm, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena topik mengenai representasi politik Generasi Z masih dalam tahap perkembangan teoritis dan membutuhkan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ilmiah yang telah membahas fenomena ini, baik secara empiris maupun konseptual. Studi literatur memungkinkan peneliti memetakan konsep, kecenderungan, dan temuan sebelumnya yang relevan untuk memahami dinamika representasi Generasi Z dalam konteks lembaga legislatif.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal nasional maupun internasional. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, keterkinian, dan kontribusinya terhadap pembahasan representasi politik dan partisipasi politik generasi muda.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi temuan, serta interpretasi berdasarkan teori representasi politik Hanna Pitkin (1967) dan teori partisipasi politik digital. Analisis ini diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara struktur kelembagaan, perilaku politik generasi muda, dan tantangan representasi formal dalam sistem politik kontemporer. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengorganisir data, tetapi juga memberikan pemahaman analitis mengenai fenomena representasi Generasi Z secara lebih sistematis dan teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Orientasi Politik Generasi Z sebagai Aktor Politik Baru

Generasi Z menunjukkan konfigurasi karakter sosial-politik yang berbeda secara substantif dari generasi-generasi pendahulunya, sehingga posisi mereka sebagai aktor politik baru memiliki implikasi strategis dalam mengkaji prospek keterwakilan di lembaga legislatif. Berbagai kajian menegaskan bahwa Generasi Z cenderung pragmatis, berorientasi pada isu spesifik, serta memiliki tingkat literasi digital yang tinggi (Rochman, 2023). Preferensi politik mereka tidak lagi berpusat pada identitas ideologis partai atau loyalitas personal terhadap figur politik, tetapi pada sejauh mana isu-isu tertentu seperti perubahan iklim, perlindungan hak digital, akses pendidikan terjangkau, dan keadilan sosial direspons secara konkret oleh institusi politik. Pergeseran orientasi ini menunjukkan reorientasi politik kontemporer dari model partai-sentris menuju *issue-based politics*, di mana rasionalitas politik lebih dibentuk oleh nilai dan kepentingan

generasional daripada struktur ideologis klasik.

Karakteristik tersebut berimplikasi pada perubahan relasi antara masyarakat, terutama generasi muda, dengan lembaga politik formal. Tidak seperti generasi sebelumnya yang cenderung bergantung pada struktur kepartaian, jejaring patronase, dan komunikasi politik yang terpusat, Generasi Z mengandalkan arus informasi yang cepat, independen, dan terdesentralisasi melalui berbagai platform digital. Akses yang luas terhadap informasi politik dan kemampuan mengolahnya secara mandiri menjadikan kelompok ini lebih kritis terhadap praktik politik, responsivitas kebijakan, serta mekanisme representasi yang mereka anggap tidak inklusif. Hal ini menciptakan kesenjangan persepsi antara tuntutan representasi yang dinamis dari Generasi Z dan pola representasi konvensional yang masih mendominasi lembaga legislatif.

Selain itu, preferensi Generasi Z terhadap bentuk partisipasi non-formal dapat dilihat dari kecenderungan mereka untuk berperan sebagai *political content creator*, aktivis digital, atau penggerak opini publik di media sosial. Ruang digital menjadi arena utama bagi mereka untuk mengekspresikan kepedulian politik, membangun narasi, bahkan memobilisasi dukungan pada isu tertentu. Pola partisipasi ini bukan hanya refleksi dari kompetensi digital mereka, tetapi juga merupakan respons terhadap persepsi bahwa struktur politik formal bersifat kaku, hierarkis, dan kurang membuka ruang bagi regenerasi politik. Konteks ini mempertegas bahwa keterlibatan politik Generasi Z lebih bersifat horizontal, partisipatif, dan responsif terhadap isu dibandingkan model representasi vertikal yang dijalankan oleh institusi legislatif.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan struktural antara kapasitas politik Generasi Z di ruang digital dengan peluang mereka untuk mengakses representasi formal di lembaga legislatif. Meski memiliki kompetensi politis, literasi digital, dan kemampuan membangun opini publik yang kuat, akses Generasi Z untuk memperoleh kursi legislatif tetap terbatas akibat hambatan struktural mulai dari dominasi senioritas dalam partai politik, ketergantungan pada modal politik dan finansial, hingga desain sistem pemilu yang kurang memberi ruang bagi kandidat muda. Dengan demikian, karakteristik politik Generasi Z tidak hanya membentuk pola partisipasi baru, tetapi sekaligus menjadi dasar analitis dalam membaca prospek keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif, baik dari perspektif peluang regenerasi kepemimpinan maupun dari sudut pandang tantangan institusional yang masih perlu diatasi.

Representasi Politik Generasi Z dalam Kerangka Teori Representasi

Dalam kerangka teori representasi Pitkin, representasi Generasi Z dapat ditinjau melalui empat dimensi, yaitu formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Representasi formal mencakup hak untuk dipilih dan mekanisme pencalonan dalam sistem politik. Secara normatif, Generasi Z telah memenuhi syarat legal untuk menjadi anggota legislatif, namun praktik politik menunjukkan bahwa ruang representasi formal mereka masih terbatas.

Generasi Z kini menjadi kelompok demografis terbesar dalam populasi usia muda, namun dalam politik formal mereka tetap menjadi kelompok dengan tingkat representasi paling rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antargenerasi, karena kekuasaan politik masih didominasi oleh politisi yang berusia lebih senior sehingga isu-isu yang menjadi kepentingan jangka panjang Generasi Z, seperti perubahan iklim, biaya pendidikan tinggi, serta akses terhadap pekerjaan layak, kurang diperjuangkan dalam perumusan kebijakan. Minimnya representasi politik ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan Generasi Z terhadap sistem demokrasi, di mana mereka merasa politik hanya melayani kepentingan kelompok tua. Literatur menunjukkan bahwa fokus penelitian selama ini lebih banyak diarahkan pada tingkat partisipasi politik anak muda, bukan pada representasi formal mereka dalam

lembaga politik. Padahal, representasi formal merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi yang menjamin bahwa setiap kelompok warga negara berhak memiliki suara dalam pembuatan kebijakan publik. Hambatan Generasi Z dalam masuk ke dunia politik disebabkan oleh faktor penyediaan kandidat (supply), seperti minimnya sumber daya pribadi, kurangnya akses pada jejaring elite politik, serta budaya senioritas dalam partai; dan faktor permintaan (demand), seperti preferensi pemilih yang lebih mengutamakan kandidat berusia lebih tua. Selain itu, dalam setiap tahap rekrutmen politik mulai dari keanggotaan partai hingga pencalonan legislatif Generasi Z sering tidak diberikan posisi strategis yang memungkinkan mereka terpilih, bahkan ketika mereka sudah berhasil menjadi kandidat. Situasi ini menunjukkan bahwa problem representasi Generasi Z bukan hanya soal rendahnya partisipasi, tetapi merupakan persoalan struktural yang perlu ditangani secara sistematis melalui reformasi institusi politik, dukungan afirmatif terhadap kandidat muda, serta upaya mengurangi bias usia dalam persepsi publik terhadap kemampuan kepemimpinan mereka.

Hambatan Struktural dalam Sistem Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki peran strategis sebagai *gatekeeper* dalam menentukan siapa yang layak dicalonkan sebagai legislator dalam pemilu. Namun dalam praktik rekrutmen politik di Indonesia, proses seleksi calon masih sangat dipengaruhi oleh faktor senioritas, kedekatan dengan elit partai, serta ketersediaan modal politik dan finansial. Generasi Z sebagai kelompok politik baru yang belum memiliki jejaring kekuasaan yang kuat sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kontestasi internal partai. Minimnya pengalaman organisasi, akses terhadap struktur kepartaian, serta keterbatasan dukungan logistik membuat pemuda kurang diprioritaskan dalam proses pencalonan, meskipun mereka memiliki kapasitas dan gagasan inovatif yang relevan dengan tuntutan pembangunan masa depan.

Hambatan tersebut semakin diperkuat oleh desain sistem pemilu yang menerapkan ambang batas parlemen (*electoral threshold*) dan keterbatasan jumlah kursi legislatif, sehingga kompetisi elektoral semakin ketat. Dengan ruang politik yang sempit, partai cenderung meminimalkan risiko politik dengan mengutamakan kandidat yang dianggap memiliki modal elektoral kuat baik berupa popularitas, kedekatan dengan elite partai, maupun sumber daya finansial yang besar. Calon dari Generasi Z, yang relatif masih baru dalam arena politik, sering kali ditempatkan pada posisi pencalonan yang tidak strategis sehingga peluang keterpilihan mereka rendah. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan pragmatisme partai yang lebih fokus pada kepentingan jangka pendek untuk memenangkan kursi, daripada berupaya mendorong regenerasi kepemimpinan dan representasi politik yang lebih berkelanjutan.

Akibat dari kondisi tersebut adalah terhambatnya proses regenerasi politik dalam lembaga legislatif. Ruang representasi bagi pemuda menjadi sangat terbatas, sehingga generasi muda yang seharusnya mulai dilibatkan sebagai pembuat kebijakan justru tetap berada di luar struktur kekuasaan formal. Hal ini menguatkan fakta bahwa rendahnya keterwakilan Generasi Z dalam parlemen bukan sekadar disebabkan oleh rendahnya minat politik pemuda, tetapi lebih pada adanya struktur rekrutmen yang belum inklusif dan masih didominasi kalkulasi politik elite. Jika hambatan struktural ini tidak segera dibenahi, maka demokrasi berisiko mengalami stagnasi dan terus dikuasai oleh figur politik lama yang kurang responsif terhadap kebutuhan generasi penerus bangsa.

Tantangan Legitimasi dan Kepercayaan Politik

Salah satu hambatan terbesar bagi Generasi Z dalam memasuki ruang parlemen adalah persoalan legitimasi politik. Meskipun secara demografis mereka merupakan kelompok pemilih terbesar, banyak pihak masih menganggap bahwa usia muda identik dengan kurangnya pengalaman, ketidakmatangan dalam mengambil keputusan strategis, serta keterbatasan kapasitas manajerial maupun diplomasi kebijakan. Stereotipe ini diperkuat oleh kultur politik Indonesia yang masih menempatkan hierarki dan senioritas sebagai indikator utama kompetensi politik (Mietzner, 2021). Dalam konteks tersebut, Generasi Z kerap diposisikan sebagai “penonton politik” yang aktif dalam ruang digital, tetapi belum dianggap layak untuk terlibat langsung sebagai aktor pembuat kebijakan dalam struktur legislatif.

Logika senioritas yang mengakar tidak hanya memengaruhi persepsi publik, tetapi juga memengaruhi preferensi partai politik dalam proses rekrutmen kader. Banyak partai masih mengutamakan politisi berpengalaman karena dianggap lebih aman secara elektoral dan lebih dapat diprediksi dalam dinamika politik internal. Akibatnya, kapasitas intelektual, literasi digital, dan inovasi gagasan yang dimiliki Generasi Z belum diterjemahkan menjadi legitimasi politik yang cukup untuk mengakses kursi legislatif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kompetensi faktual Generasi Z dan penerimaan institusional terhadap keberadaan mereka sebagai representasi formal.

Dengan demikian, persoalan legitimasi bukan hanya menjadi hambatan bagi masuknya Generasi Z ke lembaga legislatif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membaca prospek representasi mereka. Jika sistem politik mampu mengubah pola pikir hierarkis dan memberikan ruang bagi partisipasi generasi muda, maka representasi politik Generasi Z dapat semakin kuat dan berkontribusi pada pembaruan politik nasional. Sebaliknya, jika legitimasi mereka terus dihambat oleh budaya senioritas, maka kesenjangan representasi antargenerasi dalam lembaga legislatif akan semakin melebar dan berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dalam jangka panjang.

Strategi Meningkatkan Representasi Generasi Z di Parlemen

Peningkatan representasi politik Generasi Z dalam lembaga legislatif memerlukan seperangkat strategi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek kapasitas individu serta pola partisipasi politik yang berkembang di era digital.

1) Reformasi sistem kaderisasi partai melalui *youth wing empowerment*

Selama ini, mekanisme kaderisasi di partai cenderung didominasi elite senior sehingga sayap kepemudaan (*youth wing*) hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai jalur strategis untuk mempersiapkan kader potensial. (Hidayat, 2022) Dengan memperkuat peran sayap kepemudaan misalnya melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan, pelatihan kepemimpinan, dan akses langsung pada tahapan pencalonan partai dapat menghasilkan politisi muda yang lebih siap, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mampu bersaing dalam pemilu legislatif.

2) Kebijakan *affirmative action* bagi calon legislatif muda

Affirmative action dapat berbentuk kuota usia dalam daftar calon, pemberian nomor urut strategis, atau penempatan calon muda di daerah pemilihan yang memiliki peluang keterpilihan tinggi. Dengan kebijakan tersebut, Generasi Z memiliki ruang politik yang lebih proporsional untuk masuk ke lembaga legislatif, terutama mengingat kompetisi elektoral saat ini sangat ditentukan oleh modal politik dan jejaring sosial yang umumnya dimiliki politisi senior.

3) Pendanaan politik publik yang lebih *equitable* bagi kandidat muda

Penting untuk mengatasi hambatan finansial yang sering menjadi penghalang utama bagi politisi muda. Banyak kader muda yang memiliki kapasitas, ide, dan visi politik progresif tetapi kesulitan menembus kompetisi elektoral karena tingginya biaya kampanye. Melalui skema pendanaan public baik dalam bentuk subsidi kampanye, akses terhadap fasilitas logistik, atau dukungan negara untuk kampanye digital kandidat muda dapat bersaing secara lebih adil, sehingga peluang representasi mereka meningkat.

4) Peningkatan pendidikan politik dan literasi kebijakan

Strategi ini untuk memastikan bahwa Generasi Z tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memahami mekanisme dan kompleksitas proses legislasi. Pendidikan politik ini mencakup kemampuan analisis kebijakan publik, pemahaman tata kelola pemerintahan, keterampilan komunikasi politik, serta etika politik. Dengan literasi yang baik, Generasi Z akan memiliki kompetensi substantif untuk menjalankan fungsi representasi di parlemen, bukan hanya muncul sebagai simbol regenerasi.

5) Kolaborasi antara ruang digital dan institusi formal

Mengingat bahwa Gen Z sangat kuat dalam memobilisasi isu, menciptakan diskursus publik, dan membangun dukungan digital, institusi politik formal seperti partai dan parlemen perlu menyediakan kanal interaksi yang mengintegrasikan aspirasi digital ke dalam agenda kebijakan. Kolaborasi ini dapat berupa konsultasi publik berbasis platform digital, kampanye hybrid, forum aspirasi online, atau mekanisme partisipasi legislatif digital. Dengan demikian, ruang digital menjadi jembatan menuju representasi formal, bukan sekadar ruang ekspresi politik yang terpisah dari sistem institusional.

Representasi Generasi Z dalam Perspektif Demokrasi Substantif dan Masa Depan Politik Nasional

Jika ditinjau dari teori demokrasi substantif, representasi politik bukan hanya mengenai kehadiran aktor dalam lembaga legislatif, tetapi juga kemampuan merepresentasikan kepentingan publik melalui kebijakan yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks Gen Z, tantangan politik bukan hanya terkait kurangnya jumlah legislator muda, tetapi juga keterhubungan kebijakan publik dengan isu-isu yang mereka anggap penting (Helm, 2024).

Sebagai contoh, isu seperti perubahan iklim, keamanan digital, kesetaraan akses pendidikan, dan kebijakan pekerjaan layak jarang masuk sebagai isu utama dalam agenda legislasi. Padahal, survei nasional dan global menunjukkan bahwa isu-isu tersebut merupakan prioritas utama bagi pemilih generasi muda (Wahyuningroem, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya jarak representasi substantif antara lembaga politik formal dengan preferensi politik generasi baru.

Jika tidak direspons, kesenjangan ini berpotensi memunculkan krisis legitimasi politik jangka panjang, karena generasi muda dapat melihat institusi perwakilan sebagai entitas yang tidak relevan dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, apabila sistem politik mampu beradaptasi dengan memberikan ruang representasi formal yang lebih besar bagi Gen Z, maka demokrasi akan mengalami proses regenerasi aktor dan gagasan politik yang lebih sehat, inovatif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat digital.

Akhirnya, memperluas ruang representasi formal bagi Generasi Z di parlemen perlu dipandang sebagai strategi penting dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional untuk menghadapi tantangan masa depan. Transformasi digital, dinamika pasar tenaga kerja, serta kompleksitas isu sosial-politik global menuntut adanya aktor politik yang memiliki kapasitas adaptif tinggi dan kepekaan terhadap perubahan sosial yang cepat. Generasi Z, dengan keunggulan literasi digital dan orientasi nilai yang progresif, berada

pada posisi strategis untuk memberikan kontribusi terhadap modernisasi tata kelola pemerintahan dan penguatan kualitas representasi politik. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan mereka di lembaga legislatif bukan sekadar kebutuhan demografis, tetapi merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi substantif yang inklusif, responsif, dan berorientasi masa depan.

KESIMPULAN

Representasi politik Generasi Z dalam lembaga legislatif masih menghadapi berbagai hambatan struktural, institusional, dan kultural (Mietzner, 2021) meskipun mereka memiliki karakteristik sosial-politik yang progresif, literasi digital tinggi, serta orientasi politik yang berfokus pada isu-isu strategis. Keterbatasan ruang representasi formal ini disebabkan oleh dominasi senioritas dalam partai, tuntutan modal politik yang besar, mekanisme rekrutmen yang elitis, serta desain sistem pemilu yang belum inklusif terhadap kandidat muda. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara kapasitas politik Generasi Z yang kuat di ruang digital dengan peluang mereka untuk memperoleh akses pada posisi pengambilan keputusan formal, sehingga aspirasi generasional terkait isu seperti iklim, hak digital, dan pendidikan belum terakomodasi secara memadai dalam agenda legislasi.

Namun demikian, prospek peningkatan keterwakilan Generasi Z tetap terbuka apabila sistem politik mampu beradaptasi melalui reformasi kelembagaan yang mendorong keterlibatan pemuda sebagai aktor politik formal. Strategi seperti penguatan kaderisasi melalui sayap kepemudaan, kebijakan afirmatif bagi calon muda, pendanaan politik yang lebih adil, peningkatan literasi kebijakan, serta integrasi partisipasi digital ke dalam mekanisme representasi formal menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi substantif. (Helm, 2024) Dengan membuka ruang bagi aktor-aktor muda untuk berkontribusi dalam proses legislasi, demokrasi Indonesia berpotensi mengalami regenerasi politik yang lebih sehat, inovatif, dan relevan dengan tantangan sosial-politik masyarakat digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barisione, M., & Michailidou, A. (2022). *Digital natives and online political engagement*. *Journal of Youth Studies*, 25(4), 511–529.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2021). *Connective action and youth digital activism*. *Journal of Communication*, 71(3), 321–340.
- Cross, W., & Pilet, J. (2020). *Internal party democracy and youth access to candidacy*. *International Political Science Review*, 41(4), 567–582.
- Dalton, R. J. (2020). *Youth, democracy, and policy responsiveness*. *Comparative Political Studies*, 53(12), 1894–1918.
- Galston, W. A. (2021). *Youth political legitimacy and democratic stability*. *Governance*, 34(2), 305–322.
- Hazan, R., & Rahat, G. (2021). *Candidate selection and party elites*. *Party Politics*, 27(6), 1107–1120.
- Helm, C. (2024). *Substantive representation of youth interests in democratic institutions*. *Policy Studies*, 45(1), 72–90.
- Holmberg, S. (2020). *Political trust among young citizens*. *Scandinavian Political Studies*, 43(3), 245–263.
- Idris, F. (2023). *Generasi Z dan transformasi partisipasi politik digital di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 33–47.

- Inter-Parliamentary Union. (2023). *Youth Participation in National Parliaments 2023 Report*. IPU Publishing.
- Kim, J. (2022). Young legislators and public legitimacy in South Korea. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(1), 45–59.
- Kurniawan, D. (2023). Kebijakan publik dan relevansinya dengan generasi muda. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 120–137.
- Lim, M. (2022). Social media activism among Southeast Asian youth. *Asian Journal of Communication*, 32(4), 455–472.
- Loader, B. D., & Vromen, A. (2021). *Youth, social media, and new political participation*. *New Media & Society*, 23(3), 611–630.
- Mietzner, M. (2021). Elite dominance and patronage politics in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 43(3), 389–413.
- Muhtadi, B. (2020). Oligarki partai dan rekrutmen politik di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 130–145.
- Norris, P. (2023). *Generational divides in democratic legitimacy*. *Journal of Democracy*, 34(1), 22–39.
- Pitkin, H. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Prensky, M. (2020). *Understanding digital natives and political change*. *Journal of Future Studies*, 24(1), 45–60.
- Rochman, F. (2023). Perilaku politik generasi Z di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 101–119.
- Siregar, F. E. (2023). Krisis kepercayaan politik anak muda di Indonesia. *Jurnal Politik Integritas*, 9(1), 55–68.
- Sloam, J. (2022). *Youth wings and political empowerment*. *Journal of Politics*, 84(2), 411–430.
- Stockemer, D., & Sundström, A. (2024). *Youth descriptive representation in world parliaments*. *Electoral Studies*, 87, 102643.
- Suswandy, S. (2025). Keterlibatan politik generasi muda di era digital. *Educatus*, 3(1), 77–95.
- UNDP. (2022). *Young Parliamentarians and Democratic Renewal*. United Nations Development Programme.
- Vromen, A. (2021). Digital activism as a pathway to formal political participation. *New Media & Society*, 23(7), 1998–2015.
- Wahyuningroem, S. L. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 34(1), 88–109.
- Wicaksono, Y. (2022). Gen Z dan pergeseran budaya politik Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), 200–218.
- Yuliani, N. (2022). Digital natives sebagai aktor politik baru. *Jurnal Sosioteknologi*, 21(3), 310–322.
- Zeglovits, E. (2020). Age bias in candidate selection and electoral politics. *Electoral Studies*, 69, 102252.